

EVALUASI PENGENDALIAN INTERN PADA PROSES PEMBERIAN
KREDIT MODAL KERJA PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK UNIT CAKKE CABANG ENREKANG

SKRIPSI

FAJRA YANA T

105730476314



JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kepada ALLAH SWT

Yang telah memberikan jalan, kemudahan, dan kekuatan dalam hidupku

ORANG TUAKU TERCINTA

Untuk doa dan nasehat yang terus diberikantanpa mengenal waktu demi kesuksesan dan kebahagiaanku, untuk kasih sayang yang tergantikan dari tiap hembusan nafas yang telah berlalu bersama waktu dan tidak akan pernah bisa tergantiakn sampai kapanpun.

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu masalah), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Qs.Alam Nasyrah: 6-7)



LEMBAR PERSETUJUAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

Judul Penelitian : "Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pada Proses
Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT BRI (Persero)
Tbk Unit Cakke Cabang Enrekang"
Nama Mahasiswa : Fajra Yana T
No. Stambuk/NIM : 105730476314
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Telah Melakukan Ujian Skripsi Pada Tanggal 6 Oktober 2018


Makassar, Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Muchran BL, M.S
NBM: 602785


Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak., CA
NBM: 107 3428

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi Akuntansi,


Ismail Rasulong, S.E, M.M.
NBM: 903 078


Ismail Badollahi, S.E, M.Si, Ak., CA.
NBM: 1073428





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajra Yana T
Stambuk : 105730476314
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Evaluasi Pengendalian Intern Pada Proses
Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Unit Cakke Cabang Enrekang".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 06 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



Diketahui Oleh:

Dekan,



Ismail Rasulong, S.E., M.M
NBM: 903 078

Ketua Program Studi,



Ismail Badollahi, S.E., M.Si, Ak., Ca
NBM: 107 3428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **FAJRA YANA T**, NIM : **105730476314**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/2018 M, tanggal 26 Muharram 1440 H/6 Oktober 2018, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Muharram 1440 H
6 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN


1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE.,MM
(WD I Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliati, MM

2. Abd. Salam, SE., M.Si, Ak.CA

3. Ismail Rasulong, SE.,MM

4. Ramly, SE., M.Si


Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, S.E., M.M
NIM: 903 078

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim

Syukur Alhamdulillah kehadiran panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai maknanya penulisan skripsi yang berjudul “Evaluasi Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cakke Cabang Enrekang”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua penulis Bapak Tajuddin dan Ibu Musniati yang senantiasa member harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudara tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setingginya-tingginya dan terimah kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektot Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rosullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak.,CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Muchran BL M.S., selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si, Ak.,CA., selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongannya aktivitas studi penulis.
9. Terimah kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengarapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, September 2018

Penulis

ABSTRAK

FAJRA YANA, 2014. Evaluasi Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cakke Cabang Enrekang, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dimbimbing Oleh Pembimbing I H. Muchran dan Pembimbing II Ismail Badollahi.

Dalam dunia perbankan, bank memiliki jasa pelayanan kredit. Kredit ini diberikan untuk membantu pendanaan bagi pebisnis yang akan melakukan usaha. Sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja digunakan untuk memudahkan nasabah untuk meminjam uang dan memudahkan bank dalam mengelola pemberian kredit kepada nasabah. Pengendalian intern berguna sebagai fungsi control dan meminimalkan permasalahan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui mekanisme system pengendalian intern terhadap proses pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cakke Cabang Enrekang. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, sumber data adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini, maka disarankan agar tidak ada perangkapan tugas account officer, menambahkan formuli lembar ceklist, dan sebaiknya dalam pengendalian intern dilakukan pengawasan dokumen atau file-file secara rutin.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	7
1. Sistem Pengendalian Intern	7
a. Defenisi Sistem Pengendalian Intern	7

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern	8
c. Unsur-unsur Pengendalian Intern	9
d. Ciri-ciri Pokok Sistem Pengendalian Intern.....	14
e. Jenis Pengendalian Intern.....	14
f. Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern	17
2. Kredit Modal Kerja	18
a. Pengertian Kredit Modal Kerja	18
b. Jaminan Kredit Modal Kkerja	30
c. Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja.....	33
3. Tinjauan Emperis.....	41
B. Kerangka Pikir.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	46
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Metode Analisis Data	48

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah singkat PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang	49
B. Visi, Misi PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang.....	51
C. Sasaran jangka panjang Bank Rakyat Indonesia.....	51
D. Struktur Organisasi PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang	52

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja	56
1. Fungsi yang terkait	56
2. Jaringan prosedur yang membentuk sistem	57
3. Prosedur pemberian kredit modal kerja	57
4. Dokumen dan formulir yang digunakan.....	61
B. Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Modal Kerja	61
1. Pada saat proses permohonan kredit	61
2. Pada saat analisis kredit.....	64
3. Pada saat penarikan kredit.....	66
C. Flow Chart Pemberian Kredit.....	68
D. Evaluasi Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang.....	69
1. Lingkungan Pengendalian	69
2. Penaksiran risiko	73
3. Informasi dan komunikasi.....	74
4. Aktivitas pengendalian.....	75
5. Pemantauan	78

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	80
---------------------	----

B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep	45
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia	52
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BRI Unit Cakke Cabang Enrekang....	53
Gambar 5.1 Lembar Checklist.....	58
Gambar 5.2 Flow Chart Pemberian Kredit	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas bisnis saat ini sudah sangat melekat dalam kehidupan masyarakat, saat ini banyak masyarakat yang ingin mencicipi dunia bisnis dengan berbagai macam cara. Tidak dipungkiri lagi bahwa aktivitas bisnis saat ini tidak lepas dari peranan bank. Salah satu peranan bank adalah menghimpun dana masyarakat. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, sebuah bank selalu memberikan kepercayaan terhadap para nasabahnya bahwa uang nasabah tersebut akan diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Sebuah bank yang baik akan selalu menjaga kepercayaan nasabahnya.

Bank dalam menghimpun dana dari masyarakat mengandalkan asas kepercayaan. Nasabah juga menyimpan uangnya dibank menggunakan asas kepercayaan bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank yang harapannya suatu saat nanti uang nasabah akan kembali. Bank membalas kepercayaan nasabah tersebut dengan melakukan penyaluran dana kembali ke nasabah, salah satunya dengan pinjaman kredit.

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu sudah ditentukan.

Kredit tersebut dapat berupa kredit konsumtif maupun kredit yang sifatnya untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah menyediakan program kredit untuk masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan mengembangkannya dengan fasilitas program Kredit Modal Kerja.

Dalam memberikan kredit, seharusnya sebuah bank melakukan prosedur yang telah ditentukan dan memperhatikan sistem pengendalian intern yang ada di bank tersebut. Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personil lainnya, didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam efektifitas dan efisiensi operasi, Keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (COSO Framework, 2011).

Sistem pengendalian di sebuah bank sangat penting karena dengan sistem pengendalian yang baik, maka kinerja dalam sebuah bank akan efektif, sehingga dalam pemberian kredit pun akan tepat guna dan tepat sasaran.

Pengendalian intern ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi. Pengendalian intern meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam

perusahaan dalam dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi didalam operasi dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Alasan Peneliti melakukan penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia karena PT. Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negera (BUMN) yang bergerak dibidang keuangan perbankan. PT. Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank yang beroperasi di Kabupaten Enrekang yang turut meramaikan pasar kredit, dengan keunggulannya memberikan beberapa alternative kredit yang bisa dipilih oleh nasabahnya salah satunya kredit Modal Kerja. Penyaluran Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia begitu signifikan dalam kegiatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Enrekang. Kredit yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan nasabahnya yang memiliki penghasilan, usaha serta untuk memberikan kenyamanan bagi nasabah dengan bunga menarik, proses mudah dan cepat. Oleh sebab itu, peneliti ingin melihat bagaimana sistem pengendalian intern dalam proses pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cakke Cabang Enrekang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amira Ahmad pada tahun 2013 terdapat kelemahan pada pengendalian intern pada proses pemberian kredit karena sering ditemuinya penyelewangan, pemborosan dan kredit macet. Maka dari itu peneliti termotivasi untuk melakukan pemecahan

masalah dan mencari solusi bagaimana sistem pengendalian intern yang baik dalam memberikan kredit sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan dan penyelewengan. penyelewengan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan hasil penelitian dari evaluasi pengendalian intern pada proses pemberian kredit modal kerja pada PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang yaitu Bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya mampu mengembalikan kredit yang diterimanya. Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank karena adanya resiko yang timbul dalam system pemberian kredit. Permasalahan ini bias dihindari dengan adanya suatu pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan. Dengan kata lain diperlukan suatu pengendalian intern yang dapat menunjang efektifitas system pemberian kredit.

Sistem dan prosedur yang dapat menunjang keamanan proses berjalannya system pengendalian intern pemberian kredit yaitu dengan melalui formulir-formulir yang memadai, catatan-catatan dan prosedur yang mendukung efektifitas suatu system pengelolaan kredit. Pihak bank juga harus memperhatikan unsur-unsur pengendalian intern pemberian kredit. Kreditur juga berkepentingan terhadap laporan keuangan dari perusahaan yang telah atau akan menjadi debitur untuk keamanan mereka sendiri dengan menganalisa terlebih dahulu terhadap laporan

keuangan dari perusahaan tersebut dalam membayar kembali hutangnya ditambah bebab bunga.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mengajukan penelitian yang judul **“Evaluasi Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Modal Kerrja pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cakke Cabang Enrekang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah: “ Bagaimana sistem pengendalian Intern terhadap efektivitas proses pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cakke Cabang Enrekang ? “

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

“ Untuk mengetahui mekanisme sistem pengendalian intern terhadap efektivitas proses pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cakke Cabang Enrekang”.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis berkaitan dengan pengendalian intern dan kredit modal kerja terkhusus pada bank.
- b. Mengetahui dan membandingkan antara teori yang didapat/diperoleh dari bangku kuliah dengan keadaan sebenarnya di lapangan berkaitan dengan pengendalian intern khususnya pada bank.

2) Manfaat praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah bagi perusahaan/internal, sebagai berikut: "Sebagai bahan komprehensif baik kepada PT. Bank Rakyat Indonesia maupun kepada mahasiswa terkhusus yang ingin melakukan penelitian objek yang sama."

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Sistem Pengendalian Intern

a. Defenisi Sistem Pengendaliam Intern

Mulyadi (2013) mengemukakan pengertian sistem pengendalian intern bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah struktur organisasi, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, menodorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Adapun pengertian sistem pengendalian intren menurut Hery (2013) adalah Sistem pengendalian Intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Sedangkan Menurut Valery G. Kumaat (2011) bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mendukung sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk menvegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang terwujud maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang).

Berdasarkan beberapa defenisi yang dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu sistem

usaha atau sistem social yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern disusun berdasarkan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Manajemen merancang sistem pengendalian intern yang efektif dengan empat tujuan pokok berikut ini (Mulyadi 2013):

1) Menjaga kekayaan perusahaan

Bila sistem pengendalian intern berjalan dengan baik maka akan dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan, pemborosan, ketidakefisienan, dan penyalahgunaan terhadap aktivitas perusahaan.

2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Keandalan data/informasi akuntansi digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketelitian dan dapat dipercaya data akuntansi.

3) Mendorong efisiensi

Kebijakan perusahaan mampu memberikan manfaat tertentu dengan membantu setiap pengorbanan yang telah dikeluarkan dengan guna mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.

4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Untuk mencapai tujuan perusahaan maka kebijakan, prosedur, sistem pengendalian intern yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kebijakan, prosedur yang ditetapkan perusahaan akan dipatuhi oleh seluruh karyawan.

c. Unsur-unsur Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2013) Lingkungan pengendalian intern memiliki empat unsur:

1. Filosofi dan operasi. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar (*basic beliefs*) yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. *Philosophy* merupakan apa yang harus dikerjakan dan yang seharusnya tidak dikerjakan oleh perusahaan. Gaya operasi mencerminkan ide manajer yang memilih gaya operasi yang sangat menekankan pentingnya pelaporan keuangan, penyusunan dan penggunaan anggaran sebagai alat pengukur kinerja manajer, dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam anggaran .
2. Berfungsi dewan komisaris dan komite pemeriksaan. Dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas, jika penunjukan akuntan publik dilakukan oleh manajemen puncak, kebebasan akuntan

publik dapat tampak berkurang dari sudut pandang pemegang saham. Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dan perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (direksi). Dengan demikian dewan komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah konsentrasi pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen direksi.

3. Metode pengendalianj intern. Metode pengendalian manajemen merupakan metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan dan pengendalian manajemen dilakukan melalui empat tahap: (1) penyusunan program (rencana jangka panjang), (2) penyusunan anggaran (rencana jangka pendek), (3) pelaksanaan dan pengukuran, dan (4) pelaporan dan analisis.
4. Kesadaran pengendalian. Kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian yang ditunjuk oleh akuntan intern atau akuntan publik. Jika manajemen segera dilakukan tindakan koreksi atas kelemahan pengendalian intern atau akuntan publik, hal ini merupakan petunjuk adanya komitmen manajemen terhadap penciptaan lingkungan pengendalian yang baik.
 - a. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)

Penilaian resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Penilaian harus mencakup semua resiko yang dihadapi. Baik resiko individual maupun secara keseluruhan (*aggregate*), yang meliputi resiko kredit, resiko hukum, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko reputasi. Resiko strategic, dan resiko kepatuhan.

b. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication System*)

Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang memasukkan sistem akuntansi (*accounting system*), terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi entitas (dan juga kejadian-kejadian serta kondisi-kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan.

c. Aktiva Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintrah manajemen telah

dilaksanakan. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan aplikasi pada berbagai tingkatan organisasional dan fungsional.

Aktivitas pengendalian meliputi:

1) Pemisahan tugas (*segregation of duties*)

Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat curang dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

2) Pengendalian pemrosesan informasi (*information processing control*)

Luas aktivitas pengendalian sistem informasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemerolehan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk mainframe, minicomputer, dan lingkungan pemakai akhir. Pengendalian aplikasi berlaku untuk pengolahan aplikasi secara individual. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

3) Pengendalian fisik (*physical control*)

Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindung, dari akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program computer dan data *files*; dan perhitungan secara periodic dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum pada catatan pengendali.

4) Review kinerja (*performance review*)

Review atas kinerja mencakup review dan analisis yang dilakukan oleh manajemen atas:

- a) Laporan yang meringkas rincian jumlah yang tercantum dalam akun buku pembantu, seperti daftar umum piutang usaha, laporan penjualan menurut daerah pemasaran, wiraniaga, produk, dan *customer*.
- b) Kinerja sesungguhnya dibandingkan jumlah menurut anggaran, prakiraan, atau jumlah tahun yang lalu.
- c) Hubungan antara serangkain data, seperti data keuangan dengan data non keuangan.
- d) Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

Aktivitas dapat dilaksanakan melalui aktivitas yang berkelanjutan (*on going activities*) dan juga melalui pengevaluasian periodic secara terpisah.

d. Ciri-ciri Pokok Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2014) ciri-ciri pokok sistem pengendalian intern adalah:

- 1) Struktur organisasi memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

e. Jenis Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2011) pengendalian intern dapat di klasifikasikan menjadi 6 jenis yaitu:

1) Pengendalian Organisasi

Pengendalian organisasi dapat tercapai apa bila ada pemisahan tanggung jawab yang tegas. Pemisahan ini dapat berupa pemisahan tugas dan tanggung jawab diantara departemen dan didalam departemen pemrosesan data yaitu pemisahan diantara fungsi-fungsi bagian pengontrol data dan bagian pemrograman dan pengembangan

sistem. Pemisahan dan tanggung jawab tersebut berupa: a) Pemisahan tugas dan revisi seperti antara pemberi wewenang dengan bagian penyimpan aktiva yang bersangkutan dengan bagian pelaksana dan bagian yang melakukan pengolahan data. b) Pemisahan dan tanggung jawab didalam fungsi sistem informasi akuntansi dibagian pengontrol data.

2) Pengendalian dokumentansi

Membantu dalam melaksanakan pengendalian.

3) Pengendalian perangkat keras

Pengendalian ini merupakan pengendalian yang sudah dipasang didalam computer oleh pabrik pembuatannya.

4) Tindakan pengamanan

Bila pengendalian ini tidak dilakukan, akan mengakibatkan menurunnya operasi kegiatan, membahayakan sistem, menurunnya pelayanan kepada pelanggan dan hilangnya harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Penyebab tidak amannya fisik karena adanya pencurian, sabotase, kegagalan arus listrik, api, temperature, debu dan bencana alam. Teknik pengendalian diterapkan pada kekayaan fisik, fasilitas perangkat keras dan data pengendalian tersebut dilakukan guna melindungi aset perusahaan dari pencurian, bencana alam melindungi dari kerusakan.

5) Pengendalian praktek manajemen

Pengendalian prosedur manajemen memudahkan dalam pencapaian suatu sasaran. Pengendalian prosedur ini terdiri dari prosedur untuk perubahan pengembangan sistem

6) Pengendalian Transaksi

Pengendalian transaksi terbagi tiga yaitu :

- a) Pengendalian masukan. Pengendalian masukan mempunyai tugas untuk meyakinkan bahwa data transaksi yang valid telah lengkap, terkumpul semua serta dari kesalahan dilakukan proses pengolahan.
- b) Pengendalian pemrosesan. Tujuan dari pengendalian pengolahan ini adalah untuk mencegah-mencegah kesalahan yang terjadi dalam proses pengolahan data dimasukkan kekomputer.
- c) Pengendalian keluaran. Keluaran yang dihasilkan oleh sistem informasi harus lengkap terpercaya dan disampaikan kepada pemakai yang berkepentingan pengendalian ini dibagi menjadi dua yaitu untuk laporan berbentuk hatdcopy (keluarannya dicetak oleh printer).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern dapat diklasifikasikan menjadi 6 jenis yaitu pengendalian organisasi, pengendalian dokumentasi, pengendalian perangkat keras, tindakan pengamanan, pengendalian praktek manajemen, dan pengendalian transaksi.

f. Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2014), terdapat lima keterbatasan pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

1) Kelahan dalam pertimbangan

Manajemen dan personel lain sering kali salah paham dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadai informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lain.

2) Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personil keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan.

3) Kolusi

Tindakan bersama dalam individu untuk tujuan kejahatan tersebut disebut sebagai kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh sistem pengendalian internal yang dirancang.

4) Pengabaian oleh manajemen

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan

semu. Contohnya adalah manajer melaporkan jumlah laba yang lebih tinggi dari jumlah sebenarnya untuk mendapat bonus lebih tinggi.

5) Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan struktur pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu struktur pengendalian internal.

2. Kredit Modal Kerja

a. Pengertian Kredit Modal Kerja

Salah satu usaha dari bank adalah memberikan fasilitas kredit kepada nasabah. Kredit modal kerja merupakan salah satu dari jenis-jenis kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Sebelum menjelaskan tentang pengertian kredit modal kerja maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian kredit dan modal kerja.

Menurut Kasmir (2011) kredit berasal dari bahasa Yunani *Credere* yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa Latin *Credium* yang berarti kepercayaan akan kebenaran, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak

peminjam untuk melunasi Hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. Sedangkan menurut Mac Leod (dalam Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, (2011) menyatakan bahwa kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit adalah berupa tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang. Kemudian adanya sepekatan bank dengan (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (kreditor), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.

Dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika membahas mengenai kredit maka termasuk membahas unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang atau jasa benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar yang melandasi mengapa suatu kredit berani diluncurkan kepada debitur.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana kedua belah pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua telah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu. Jangka waktu merupakan jangka waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Resiko

Akibat adanya tanggung tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian suatu kredit. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah maupun resiko yang tidak disengaja oleh nasabah maupun resiko yang tidak disengaja seperti bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa adanya kesengajaan lainnya.

5. Balas jasa

6. Bagi bank, balas jasa merupakan suatu keuntungan atau pendapatan atas pemberian fasilitas kredit.

Pengelompokkan jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2012) dapat dilihat dari :

1. Kredit dilihat dari Segi Kegunaannya

- a. Kredit Investasi

Kredit Investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru atau keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lebih lama dan dibutuhkan modal yang relative besar pula.

- b. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasinya. Sebagai kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan produksi perusahaan.

2. Kredit dilihat dari Segi Jangka Waktu

- a. Kredit Jangka Pendek (*short term loan*)

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal satu tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah (*medium term loan*)

Yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Biasanya kredit jangka menengah ini dapat berupa kredit modal kerja atau kredit investasi yang relative tidak besar jumlahnya.

c. Kredit Jangka Panjang (*long term loan*)

Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih 3 tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi.

a. Kredit Konsumtif

3. Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada Kredit dilihat dari Segi Tujuannya

b. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha produksi/investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit dan kredit akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industry menghasilkan barang industry.

pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan untuk dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabot rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

4. Kredit dilihat dari Sektor Usaha

Menurut sector ekonominya, kredit ini terdiri dari:

a. Kredit untuk sector pertanian

Yaitu kredit dengan tujuan produktif dalam rangka menghasilkan hasil disektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun modal kerja. Sektor pertanian disini termasuk pula pengertian untuk: perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perburuan binatang dan sarana-sarananya.

b. Kredit untuk sector pertambangan

Kredit untuk membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam bentuk padat, cair, dan gas yang meliputi minyak dan gas bumi, biji logam, batu bara dan barang-barang tambang lainnya.

c. Kredit untuk sector perindustrian/*manufacturing*

Yaitu kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan-kegiatan mengubah bentuk (*transormasi*), meningkatkan faedah dalam

bentuk pengolahan-pengolahan baik secara mekanik maupun secara kimiawi dari satu bahan menjadi barang baru yang dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia dan lain-lain.

d. Kredit untuk sektor listrik, gas dan air

Yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan dan distribusi listrik, gas dan air, baik untuk rumah tangga, industri maupun untuk tujuan komersil.

e. Kredit untuk sector kontruksi

Yaitu kredit-kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung, rumah, pasar, jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan udara, proyek irigasi, jembatan dan lain sebagainya.

f. Kredit untuk sector perdagangan, restoran dan hotel

Yaitu kredit untuk mebiayai usaha-usaha perdagangan, baik perdagangan eceran, tengkulak, distribusi, eksportir dan importir. Sektor ini meliputi pula usaha rumah makan, penginapan, hotel dan pariwisata.

g. Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi

Yaitu kredit baik investasi maupun modal kerja untuk tujuan pengangkutan umum, baik angkutan darat, sungai, laut dan udara. Ke dalam sektor ini termasuk pula biro-biro perjalanan, pariwisata, pergudangan dan komunikasi yang meliputi pos, telepon, internet dan satelit.

h. Kredit untuk sector jasa-jasa dunia usaha

Yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor-sektor *real estate*, profesi/advokat/pengacara, notaris, insinyur, *leasing company* (yaitu usaha-usaha sewa beli barang-barang modal), lembaga keuangan bukan bank, asuransi dan sebagainya.

i. Kredit sektor jasa-jasa social masyarakat

Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dibidang kesenian dan kebudayaan (film, gedung-gedung pertunjukan dsb.) serta jasa-jasa pengarang, pelukis, musikus, dsb. Termasuk ke dalam sektor ini ialah kegiatan-kegiatan jasa-jasa seperti kedokteran, rumah sakit, poliklinik, pendidikan, bengkel-bengkel serta reparasi.

j. Kredit untuk sector lain-lain

Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai sektor-sektor yang tidak termasuk diatas. Misalnya kredit untuk tujuan-tujuan konsumtif.

5. Kredit dilihat dari Segi Jaminan

a. Kredit tidak memakai jaminan (*Unsecured Loan*)

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

b. Kredit dengan memakai jaminan/agunan (*Secured Loan*)

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

6. Kredit dilihat dari Segi Kualitas

Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur serta melunasi pinjamannya kepada bank. Dengan dasar tersebut maka kualitas kredit dapat ditetapkan berdasarkan klasifikasi/kolektabilitasnya. Kolektabilitas kredit menurut SK DIR. BI no. 30/267/Kep/DIR/1998 adalah sebagai berikut:

1. Kredit Lancar (*Pass*)

Kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
- c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan jaminan tunai (*cash collateral*).

2. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui Sembilan puluh hari
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan, atau
- c. Mutasi rekening relative aktif, atau
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau
- e. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Kredit yang digolongkan ke dalam kurang lancar ini apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau yang telah melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Frekuensi mutasi rekening rendah
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumentasi pinjaman yang lemah
- g. Diragukan (*Doubtful*)

Kredit digolongkan ke dalam kredit yang diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 180 hari

- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bunga
- e. Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit ataupun pengikatan jaminan.

4. Macet (*Loss*)

Kredit digolongkan ke dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Berdasarkan uraian diatas, maka kredit modal kerja merupakan salah satu jenis kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk membiayai operasional perusahaan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun proses produksi samapi barang tersebut terjual. Pengerian kredit modal kerja menurut Kasmir (2012) yaitu modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan dan aktiva lancar.

Prinsip dari modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus yaitu dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku kemudian diproses menjadi barang jadi lalu dijual baik secara tunai atau kredit selanjutnya memperoleh uang tunai kembali. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin kelangsungan operasinya tersebut.

Modal kerja yang dibutuhkan perusahaan harus segera terpenuhi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja tersebut sangat sulit sehingga sering terjadi tidak tersedianya modal kerja yang sesuai kebutuhan. Hal ini disebabkan terpenuhi tidaknya kebutuhan modal kerja sangat kepada beberapa faktor yang memenuhinya. Oleh karena itu, pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan terutama kebijakan dalam upaya pemenuhan modal kerja harus selalu memperhatikan faktor-faktor tersebut.

Menurut Kasmir (2011) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kredit modal kerja, yaitu:

1. Jenis Perusahaan
2. Syarat kredit
3. Waktu produksi
4. Tingkat perputaran persediaan

Bentuk-bentuk kredit modal kerja antara lain:

1. Kredit modal kerja untuk pedagang, antara lain:
 - a. Kredit ekspor
 - b. Kredit pertokoan, dan sebagainya.
2. Kredit modal kerja bidang industri, antara lain:
 - a. Kredit modal kerja makanan/minuman dalam kemasan
 - b. Kredit modal kerja pabrik, tekstil, dan sebagainya.
3. Kredit modal kerja untuk bidang perkebunan/pertanian, antara lain:
 - a. Kredit untuk membeli pupuk
 - b. Kredit untuk membeli obat-obatan anti hama, dan sebagainya.
4. Kredit modal kerja untuk kontraktor bangunan.
5. Kredit modal kerja untuk perbengkelan pusat service.
6. Dan sebagainya.

b. Jaminan Kredit Modal Kerja

Bank dalam memberikan kredit kepada debitur tentu saja menghendaki jaminan atas kredit yang diberikan. Namun sejalan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, saat ini sudah mulai banyak bank yang memberikan kredit tanpa jaminan (agunan) kredit jenis ini dikabulkan oleh bank jika prospek usaha debitur sangat baik terkait dengan reputasi debitur tersebut.

Sebenarnya penilaian tentang jaminan fisik timbul apabila keadaan usaha debitur kurang baik/kuat. Namun, kelayakan bank akan muncul apabila debitur bersangkutan dapat menyediakan sejumlah jaminan fisik yang dapat menutupi pinjaman tersebut.

Adapun bentuk-bentuk yang dapat diterima oleh bank sebagai jaminan kredit yang dapat diterima oleh bank sebagai jaminan kredit yang diberikan antara lain:

1. Jaminan dengan barang-barang

Jaminan berupa barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Barang bergerak misalnya kendaraan, barang dagangan dan lain-lain, sedangkan barang tidak bergerak misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya.

2. Jaminan surat-surat berharga

Jaminan ini berupa surat-surat berharga seperti surat deposito, wesel, sertifikat bank dan obligasi-obligasi pemerintah.

3. Jaminan orang

Jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain orang yang memberikan jaminan itulah yang menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah. Seseorang yang bertindak sebagai penjamin haruslah dikenal dengan baik oleh pihak bank, baik segi keberadaan usahanya maupun pribadinya.

Adapun dalam segi penilaian jaminan hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Jumlah dan nilainya

Jumlah dan nilai jaminan harus dapat menjamin kepentingan bank bila terjadi suatu kemacetan kredit sehingga jaminan tersebut terpaksa dicairkan untuk diubah menjadi uang. Setiap bank menentukan sendiri nilai dari jaminan tersebut. Biasanya jaminan yang ada dinilai sedemikian rupa dan harus berada diatas jumlah kredit yang diberikan ditambah dengan suatu jumlah atau persentase tertentu. Untuk itu sebaiknya nilai jaminan kredit adalah minimal sebesar 125% dari jumlah kredit, dan dapat pula jaminan tersebut melebihi persentase diatas misalnya 150% ke atas.

2. Status kepemilikan

Kemepilikan merupakan hal yang penting untuk dijadikan perhatian. Harus dengan jelas diketahui bahwa jaminan tersebut benar-benar milik si pemohon kredit. Bila jaminan bukan milik si pemohon kredit, maka harus ada surat kuasa di surat pernyataan dari si pemilik yang bersedia harta miliknya dijaminkan oleh si pemohon kredit kepada bank.

3. Daya tahan dan *marketability*

Jaminan kredit berupa barang sesuai dengan umur dan teknisnya berbeda-beda-beda dalam daya tahan dan *marketability*. *Marketability* adalah kekuatan barang jaminan itu untuk dijual. Bila *marketability* lemah dan daya tahannya sedikit maka nilainya akan turun terus-menerus.

4. Cara-cara pengikatan

Cara pengikatan barang-barang jaminan sangat penting untuk diperhatikan oleh pejabat-pejabat bank, artinya pengikatan itu harus kuat dan benar-benar dapat menjamin kepentingan bank, sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Bagi barang-barang yang bergerak, pengikatan yang dilakukan dengan cara gadai (*pandsovereenkomst*) sebagaimana diatur dalam buku II bab 20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dengan cara penyerahan hak milik berdasarkan F.E.O (*Fiduciare Eigendoms Overdracht*) yang berdasarkan yurisprudensi pengikatnya dikategorikan sebagai gadai. Bagi barang-barang tidak bergerak, pengikat jaminan dilakukan dengan akte hipotik, dimana tata cara dan prosedurnya diatur dalam buku II bab 21 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbankan Indonesia, lazim digunakan pengikatnya dengan cara F.E.O yaitu pengikat barang-barang tidak bergerak berdasarkan kepercayaan F.E.O disertai suatu daftar barang-barang yang diserahkan dan dengan suatu Surat Kuasa untuk menjual barang jaminan tersebut kepada pihak bank, dalam hal ini bank harus berhati-hati dan benar-benar meyakini calon debitur, sehingga bedrhasil tidaknya bentuk jaminan dengan cara F.E.O ini sepenuhnya tergantung dari niat baik dari nasabah itu sendiri.

c. Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja

Prosedur pemberian kredit merupakan tahapan-tahapan yang dilalui untuk memberikan kredit. Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum sama, antara satu bank dengan bank lainnya memiliki prosedur yang tidak jauh berbeda. Hal yang menjadi perbedaan mungkin terletak pada bagaimana tujuan bank tersebut serta

persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing. Tujuan utama dari prosedur ini untuk mempermudah bank menilai kelayakan suatu permohonan kredit, sehingga dapat mencegah terjadinya kredit bermasalah. Secara garis besar prosedur pemberian kredit menyangkut permasalahan.

- 1) Standar dokumentasi kredit
- 2) Perlindungan melalui program asuransi
- 3) Pengawasan kredit
- 4) Pedoman khusus penanganan kredit tertentu

Sebelum pihak bank memberikan fasilitas kepada nasabah, bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Oleh karena itu, bank memerlukan informasi tentang data-data yang dimiliki oleh calon penerima kredit. Data-data yang dimaksud penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah, sehingga menumbuhkan kepercayaan bank akan memberikan kreditnya.

Dalam menanggapi permohonan kredit dari calon nasabah, bank biasanya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan akan aman, artinya baik kredit maupun bunganya dapat dibayar oleh nasabah sesuai dengan waktu yang disepakati. Untuk itu sebelum memberikan kreditnya kepada nasabah, bank memperoleh beberapa kriteria yang mencakup analisis 5C, yaitu:

- a) *Character* (Watak/Kepribadian)

Character adalah sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Dalam hal ini bank meyakini benar bahwa calon debiturnya memiliki reputasi baik, artinya selalu menepati janji dan tidak terlibat hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, misalnya penjudi, pemabuk, atau penipu. Untuk dapat membaca sifat atau watak dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa social.

b) *Capacity* (kemampuan)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Bank harus mengetahui secara pasti kemampuan calon debitur dengan melakukan analisis usahanya dari waktu ke waktu. Pendapatan yang selalu meningkat diharapkan kelak mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya. Sedangkan bila diperkirakan tidak mampu dan dapat menolak permohonan dari calon debitur. *Capacity* sering disebut dengan nama *Capability*.

c) *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini,

termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, beberapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman.

d) *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selain dengan menggunakan prinsip 5C diatas, penilain kredit juga dapat dilakukan berdasarkan analisa dengan studi kelayakan, yaitu:

1) Aspek hukum

Dalam aspek ini, bank akan memeriksa dokumen/surat-surat yang diberikan oleh calon debitur harus asli dan memiliki keabsahan.

2) Aspek pasar dan pemasaran

Penilaian dalam aspek pasar dan pemasaran yaitu produk yang dibiayai kredit harus laku dipasar dan calon debitur mempunyai strategi pemasaran yang baik.

3) Aspek keuangan

Bank akan menilai posisi keuangan calon debitur dimana calon debitur harus memiliki kemampuan dalam membiayai dan mengelola usahanya.

4) Aspek operasi/teknis

Calon debitur memiliki lokasi usaha, tata letak ruangan dan kapasitas produksi yang menguntungkan.

5) Aspek manajemen

Calon debitur harus memiliki sumber daya manusia yang mendukung usaha baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

6) Aspek ekonomis

Dampak ekonomi dan social yang timbul dari usaha tersebut terhadap masyarakat harus lebih menguntungkan.

7) Aspek AMDAL

Usaha calon debitur tidak boleh berdampak buruk terhadap lingkungan dan ada cara serta usaha pencegahan terhadap dampak tersebut.

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh bank adalah :

1) Pengajuan berkas-berkas

Nasabah mengajukan berkas permohonan kredit dalam suatu proposal permohonan kredit dengan dilengkapi:

- a) Latar belakang perusahaan
- b) Maksud dan tujuan
- c) Besarnya kredit dan jangka waktu
- d) Sistem pengembalian kredit
- e) Jaminan kredit

2) Penyelidikan berkas-berkas pinjaman

3) Wawancara I

4) *Survey* ke lapangan

5) Wawancara II

6) Keputusan kredit

Keputusan kredit yang diterima akan dipersiapkan administrasinya.

Keputusan kredit mencakup:

- a) Jumlah uang yang diterima
 - b) Jangka waktu kredit
 - c) Biaya-biaya yang harus dibayar
- 7) Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya
- 8) Realisasi kredit dan pemberian dana pinjaman

Pemberian kredit kepada pelanggan dilakukan berdasarkan analisa kelayakan pemberian kredit. Analisa kelayakan pemberian kredit kepada pelanggan pada dasarnya adalah memperkirakan kemampuan pelanggan dalam mengelola usahanya sehingga akan dapat membayar kewajibannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan :

- Menerapkan prinsip-prinsip umum pemberian kredit
- Menganalisa berkas dokumen atau catatan pelanggan
- Mencari masukan dari sumber-sumber lain, misalnya: daftar hitam penunggak kredit, kelompok usaha yang sejenis, mitra usaha pelanggan.

Dari uraian tersebut, analisa kelayakan kredit dimaksudkan untuk melakukan kelayakan pemberian kredit yang akan diberikan kepada pelanggan. Analisa kelayakan kredit dapat menentukan tingkat kepercayaan kepada pelanggan dan dapat menghindari kemungkinan terjadinya kerugian di masa yang akan datang akibat adanya kredit macet.

Secara umum analisis kelayakan kredit dapat dilakukan dengan menggunakan analisis sebagai berikut:

- 1) Rasio Lancar, rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang jangka pendek. Likuiditas perusahaan diketahui dengan cara membandingkan aktiva lancar (*current assets*) dengan hutang lancar (*current liabilities*). Rasio yang dikatakan baik atau sehat apabila hasil perbandingan yang diperoleh $AL : HL = 2:1$, artinya satu rupiah hutang jangka pendek dijamin dengan dua rupiah aktiva lancar atau harta lancar.
- 2) Rasio Solvabilitas, rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut dibubarkan, dengan kata lain rasio ini menunjukkan cukup tidaknya harta perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara Total Aktiva dengan Total Hutang (TA : TH), dikatakan baik apabila perbandingannya 1,5 : 1, minimal 1 : 1. Apabila Total Aktivanya kurang dari 1, maka perusahaan tersebut dalam keadaan kurang *solvable*.
- 3) Rasio Profitabilitas, rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan debitur dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Hal ini dapat dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan penjualan yang dilakukan debitur.

- 4) *Average Collecting Ratio*, rasio ini digunakan untuk menghitung berapa lama rata-rata piutang dapat diterima pembayarannya. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan jumlah piutang selama setahun dengan jumlah penjualan. Semakin pendek waktu penerimaan piutang akan semakin baik, karena modal yang tertanam dalam piutang semakin kecil. Hal ini pun dapat juga dibandingkan dengan syarat pembayaran yang diberikan oleh pelanggan kepada konsumennya. Sehingga dapat diketahui konsumen pelanggan tersebut banyak yang lewat jatuh tempo atau tidak pembayarannya.
- 5) *Analisi Umur Piutang*, analisis dapat digunakan untuk pelanggan lama dengan data yang telah tersedia di perusahaan. Data yang diperlukan dapat diambil dari data mutasi piutang yang ada di Kartu Piutang. Dalam analisis ini, Piutang dipisahkan menjadi piutang yang belum menunggak dan piutang yang telah menunggak. Dengan demikian, akan diketahui bonafiditas dan status kredit dari para debitur. Selanjutnya hasil analisis digunakan sebagai pedoman untuk menentukan pemberian kredit kepada pelanggan apabila pelanggan yang bersangkutan mengajukan permohonan kredit kembali.
- 6) *Inventory Turn Over Ratio*, rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat perputaran mutasi barang pada suatu perusahaan. Semakin tinggi tingkat perputaran menunjukkan keadaan yang semakin baik, karena berarti barang tersimpan di gudang akan semakin pendek waktunya.

3. Tinjauan Emperis

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan evaluasi pengendalian intern pada proses pemberian kredit modal kerja. Pada penelitian Amanina (2011) penelitian tentang evaluasi terhadap sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit mikro pada PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Majapahit Semarang. Metode analisis data yang digunakan adalah penrepan sistem pengendalian intern pemberian kredit mikro. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa PT Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang telah memenuhi unsur lingkungan pengendalian internal dengan adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas, unsure penaksiran resiko dimudahkan dengan adanya *Loan Origination System (LOS)* dan *Micro Banking Scoring System (MBSS)* yang dapat mengelola data dengan baik sehingga kualitas kredit yang diterima dapat dipertanggungjawabkan serta untuk informasi dan komunikasi berjalan dengan baik. Namun, banyaknya aplikasi kredit yang diterima oleh PT Bank Mandiri Semarang tidak diimbangi dengan jumlah karyawan yang mencukupi pada posisi Mikro Kredit Analis (MKA), sehingga proses analisis kredit cenderung lama dan tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, keseimbangan antara sumber daya manusia yang kompeten dengan teknologi yang sesuai akan memaksimalkan kinerja perusahaan.

Deki Yulkarnain (2012) melakukan penelitian tentang Analisis kresit Macet Usaha Mikro Kecil di Sentra Konveksi Sobontoro Kabupaten

Tulungagung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kredit macet usaha mikro kecil dan menengah di Sentra Konveksi Desa Sobontor Kecamatan Bonyolangu Kabupaten Tulungagung serta factor dominan yang menyebabkan terjadinya kredit macet tersebut. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel dependent yang digunakan untuk mengetahui factor-faktor penyebab terjadinya kredit macet (variabel independent). Variabel dependent tersebut antara lain: pendapatan, jumlah pinjaman, laba usaha, pendidikan non formal, pemasaran local, dan pemasaran lainnya. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent dilakukan dengan uji regresi. Dari penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: secara simultan (bersama-sama) keseluruhan variabel dependent secara signifikan memiliki pengaruh terhadap terjadinya kredit macet usaha konveksi Kelurahan Sobontoro, secara parsial variabel pendapatan, jumlah pinjaman, laba usaha dan pemasaran secara signifikan memiliki pengaruh memiliki pengaruh terhadap kredit macet, sedangkan variabel pendidikan non-formal secara signifikan tidak memiliki pengaruh terhadap kredit macet, variabel yang paling dominan terhadap terjadinya kredit bermasalah adalah laba usaha.

Ni Wayan Wedayani dan I Ketut Jati (2013) melakukan penelitian tentang Efektivitas fungsi badan pengawas sebagai internal auditor dalam pengawasan terhadap pemberian kredit pada LPD di Kecamatan Rending,

Selat, Sidemen, dan Manggis Kabupaten Karangasen, Provinsi Bali. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer berupa penyebaran kuesioner ketua LPD, kasir, dan tata usaha yang terkait langsung dengan pemberian kredit. Dari 51 LPD aktif yang ada di Kecamatan Rendang, Selat, Sidemen, dan Manggis, sebanyak 44 LPD atau 86,27% tingkat efektivitas fungsi badan pengawas sebagai internal auditor dalam pengawasan terhadap pemberian kredit telah dilaksanakan secara efektif dan sisanya sebanyak 7 LPD atau 13,73% tingkat efektivitas fungsi badan pengawas sebagai internal auditor dalam pengawasan terhadap pemberian kredit dilaksanakan kurang efektif.

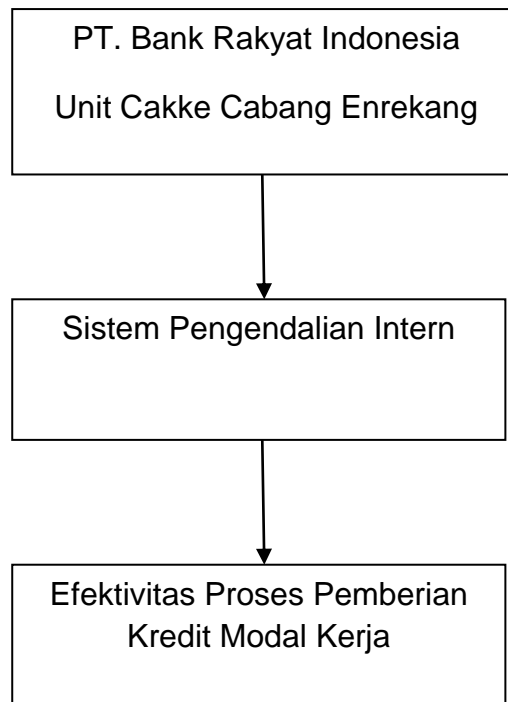
Miradewi (2014) meneliti tentang evaluasi sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt sudah baik dan dikategorikan memadai. Adanya pemisahan tugas dan tanggungjawab dalam struktur organisasinya, sistem melaksanakan fungsi tiap unit organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt efektif dan diharapkan lebih memaksimalkan bagi penerapan sistem pengendalian intern dengan cara melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sesering mungkin, sehingga jika terjadi masalah dapat diketahui sejak dini.

Faradila A. Salim (2015) meneliti tentang analisis sistem penerapan akuntansi dalam mendukung pengendalian internal pemberian kredit pada PT. Bank Bukopin Manado. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif. Jenis data penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder mengenai sejarah perusahaan, sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Bank Bukopin Cabang Manado. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan sistem informasi akuntansi dalam mendukung pengendalian internal pemberian kredit pada PT. Bank Bukopin Cabang Manado sudah dijalankan dengan baik.

B. KERANGKA KONSEP

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cakke Cabang Enrekang merupakan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman bagi pengusaha dan mengevaluasi sejauhmana Pengendalian Intern terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Indonesia Unit Cakke Cabang Enrekang, diketahui dengan menjelaskan Sistem Pengendalian Intern dan Efektivitas Proses Pemberian Kredit Modal Kerja.

Adapun kerangka piker yang telah diuraikan dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Gambar 2.1

KERANGKA KONSEP

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus Bank Rakyat Indonesia Unit Cakke Cabang Enrekang. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini hanya berlaku pada Bank Rakyat Indonesia Unit Cakke Cabang Enrekang.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam proses pemberian kredit modal kerja, meliputi pimpinan cabang, kepala bagian kredit, dan pejabat pengelolaan kredit lainnya.

2. Objek Penelitian

- a. Prosedur dalam pemberian kredit modal kerja.
- b. Sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit modal kerja.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cakke Cabang Enrekang. Penelitian ini dimulai pada bulan April 2018 sampai bulan Mei 2018.

D. Jenis dan Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cakke Cabang Enrekang, sebagai berikut :

1) Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dalam proses kegiatan pemberian kredit kepada pengusaha ekonomi lemah.

2) Wawancara

Teknik interview dilakukan dengan jalan wawancara secara langsung dengan pimpinan, kepala bagian pembukuan dan keuangan atau sejumlah personil yang berhubungan dengan penulisan proposal ini yang diperoleh dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cakke Cabang Enrekang.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan. Metode dokumentasi pada penelitian ini adalah mencari, mencatat, mengumpulkan informasi mengenai kredit modal kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cakke Cabang Enrekang.

b. Data Sekunder

Berikut data yang diperoleh dari buku-buku, dan dokumen-dokumen dari perusahaan serta berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian sebagai sumber informasi.

E. Metode Analisa Data

Adapun teknik analisa data digunakan dalam penelitian ini yakni Analisa Deskriptif, Kualitatif yaitu data yang diperoleh dan disimpulkan kemudian dianalisis berdasarkan metode yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, akan dibandingkan antara teori yang dipelajari dengan data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dilakukan pengolahan data analisis untuk mendapatkan kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Umum Perusahaan

Berdirinya PT. BRI (persero) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kelahiran kesatuan republik Indonesia. Sejarah berdirinya bank ini bermula dari Raden Wiraatmaja dkk, mendirikan "*De Poerwokerto Hulpen Spaalbank der Inlandashe Holden*" atau bank penolong dan Tabungan Priyayi Poerwokerto, 16 Desember 1885.

Kemudian pada tahun 1898 bersama bantuan pemerintah Hindia Belanda didirikan *Volbanken* atau disebut juga bank rakyat, yang daerah kerjanya meliputi wilayah administrasi kabupaten atau *afleding*. Akan tetapi, *Volbanken* tersebut mengalami kesulitan sehingga pemerintah Hindia Belanda turut campur dalam perkreditan rakyat pada tahun 1904 yang membantu *volbanken* secara material maupun secara immaterial

Perkembangan sejarah politik Indonesia ternyata banyak membawa pengaruh terhadap perkembangan sejarah Bank Rakyat Indonesia. Dengan surat keputusan Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Serikat tanggal 16 Maret 1945 dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta untuk dijadikan direksi HARRIS. Akan tetapi, keputusan tersebut menuai protes dari federasi, ⁱ sebab kantor besar HARRIS belum merupakan realita, sehingga menteri Kemakmuran RIS meralatnya dengan menanamkan direksi bank itu direksi AVB Bank Rakyat Indonesia

RIS meraihnya dengan menanamkan direksi bank itu direksi AVB Bank Rakyat Indonesia.

Volkcredietbak bank baru dibuburkan pada tanggal 29 Agustus 1951, dan diperbaharui peraturan pemerintah yang lama dengan yang baru nomor 25 tahun 1951, maka dengan peraturan pemerintah pengganti UU no 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan yang pada waktu itu kebijakan pemerintah mengarah pada terciptanya bank tunggal. Hal tersebut berdasarkan Penpres No. 42 tahun 1965 dan surat Menteri Bank Sentral No. 42 tahun 1965.

Pada tahun 1968 berdasarkan UU No. 14 tahun 1967 tentang UU Pokok Perbankan dan UU No. 13 tahun 1968 tentang UU Bank Sentral, mengembalikan fungsi bank, Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Negara Indonesia unit II bidang ekspor impor dipindahkan menjadi bank milik Negara dengan nama :

1. Bank Rakyat Indonesia, yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan Bank Negara Indonesia bidang ekspor impor dengan UU No. 21 tahun 1968.
2. Bank Ekspor Impor Indonesia, yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan Bank Negara Indonesia dengan UU No 22 tahun 1968.

Adapun jumlah jaringan kinerja BRI terdiri dari 1 kantor pusat, 13 Kantor Wilayah, 11 Kantor Inspeksi, 325 Kantor Cabang, 147 Kantor Cabang Pembantu, 8 Kantor Cabang Syariah, 3.945 BRI Unit, serta 199

Pos Pelayanan Desa. Sehingga seluruhnya berjumlah 4.658 kantor untuk di Indonesia, dan 4 Kantor Cabang Luar Negeri yaitu di New York, Hongkong, Singapura, dan Los Angeles. Selain itu bank BRI mempunyai hubungan baik dengan bank-bank penting seluruh dunia.

B. Visi Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Visi Bank Rakyat Indonesia adalah “menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah”.

Misi Bank Rakyat Indonesia yaitu:

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik, dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang professional dengan melaksanakan praktik *Good Corporate Governance*.
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

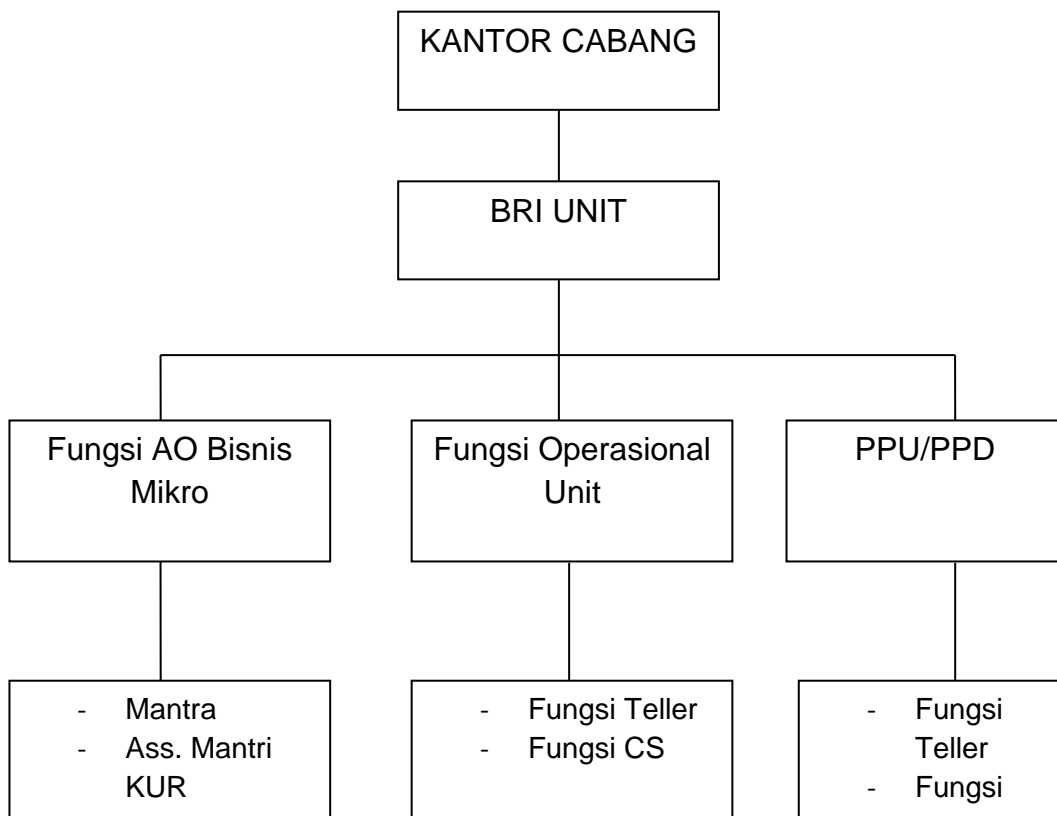
Berdasarkan dari visi dan misi BRI, maka BRI telah mempunyai tujuan yang jelas khususnya dibidang kredit, yaitu menjadi bank komersial dengan menitikberatkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.

C. Sasaran jangka panjang Bank Rakyat Indonesia

1. Menjadi bank sehat dan salah satu dari lima bank terbesar dalam asset dan keuntungan.

2. Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Menjadi bank terbesar dan tertarik dalam pengembangan agribisnis.
4. Menjadi salah satu bank *go public* terbaik.
5. Menjadi bank yang melaksanakan *good corporate governance* secara konsisten.

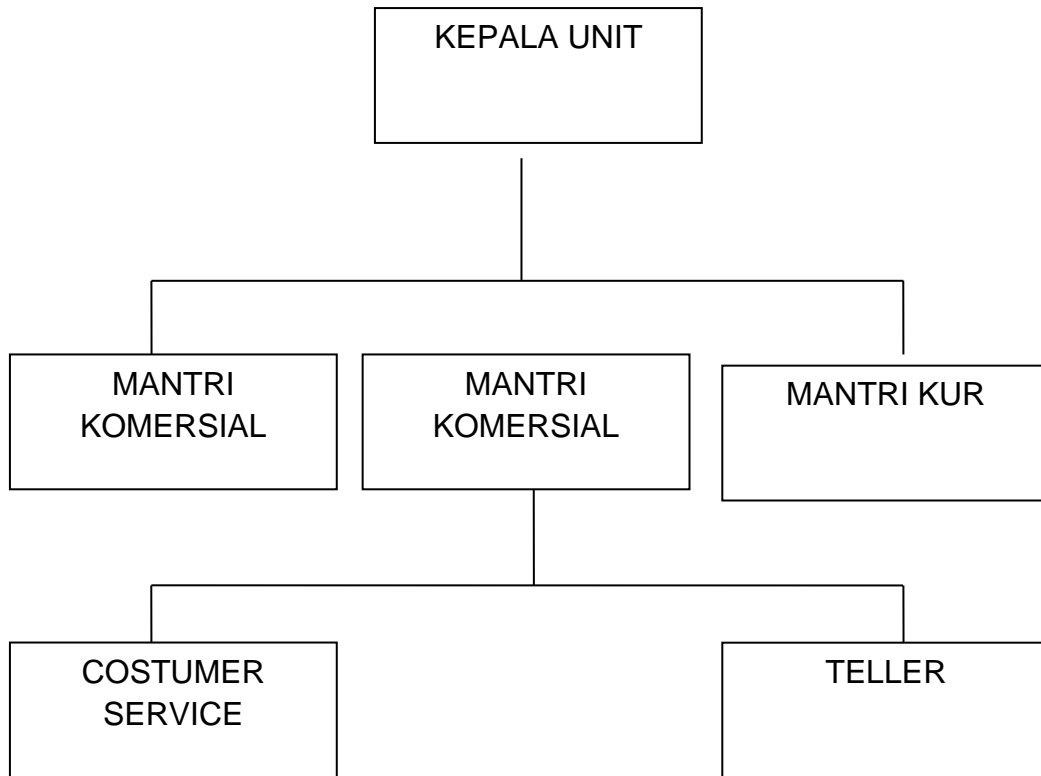
D. Struktur Bank Rakyat Indonesia



Gambar 4.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BANK RAKYAT INDONESIA

Adapun struktur organisasi BRI Unit Cakke Cabang Enrekang yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.2

STRUKTUR ORGANISASI BRI UNIT CAKKE CABANG ENREKANG

a. Tugas dan Wewenang masing-masing jabatan:

1. Kepala Unit Cakke Cabang Enrekang

Tugas:

- a) Mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi bisnis BRI Unit diwilayah kerjanya untuk mencapai target
- b) Melaksanakan pembinaan nasabah BRI Unit baik pinjaman maupun simpanan.

Wewenang:

- a) Memutus usaha KUR, Kupedes, dan BRInet sesuai kewenangan yang diberikan.
- b) Memutus biaya promosi.
- c) Manfaat pencairan/penarikan simpanan.
- d) Melakukan fiat bayar pinjaman yang telah diputus.

2. Mantri

Tugas:

- a) Melaksanakan pemasaran produk BRI Unit (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya).
- b) Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI Unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak.
- c) Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.

Wewenang:

- a) Pemprakarsai permintaan pinjaman.
- b) Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman.

3. Customer Service

Tugas:

- a) Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan di BRI.
- b) Memberikan informasi kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk BRI Unit.

- c) Melaksanakan pemeriksaan dan registrasi permohonan pinjaman BRI Unit dan simpanan sertajasa bank.

4. Teller

Tugas:

- a) Memberikan pelayanan transaksi kas ataupun *overbooking*, serta memberikan pelayanan pembayaran dari dan ke nasabah untuk kepentingan bisnis BRI sesuai dengan system yang jelas dan prosedur operasional BRI.
- b) Memberikan pelayanan transaksi kas baik penerimaan setoran, pengambilan maupun pembayaran dari dan ke nasabah atau calon nasabah.
- c) Melakukan pengurusan kas BRI Unit bersama Kepala Unit untuk mengamankan asset bank.
- d) Melakukan kegiatan pemeriksaan fisik uang untuk memastikan keaslian uang diterima

BAB V

HAIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja

Penelitian yang sudah dilakukan pada system dan prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki dan dipertimbangkan agar pengendalian intern dapat terlaksana dengan baik. Berikut ini analisis kredit modal kerja dan sudah diolah oleh peneliti:

1. Fungsi yang terkait

- a. Fungsi Customer service, fungsi customer service ini sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik, dalam melakukan tugas-tugasnya dalam hal memberikan kepuasan melalui pelayanan.
- b. Fungsi Account officer, fungsi ini juga sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik tetapi masih ada kekurangan pada fungsi account officer ini, karena pada fungsi ini ada perangkapan tugas dalam melakukan pemasaran, pemeriksaan agunan, dan penunggakan. Hal ini bias menjadi kelemahan, karena dalam hal ini kemungkinan terjadinya ketidaktepatan bias terjadi.
- c. Fungsi Kepala Unit, fungsi ini sudah melakukan fungsinya dengan baik dan sesuai dalam mengelola, memberikan keputusan, dan mengawasi perusahaan. Tetapi masih ada kekurangan, seharusnya pada pemeriksaan penilaian agunan fungsi Kepala Unit ini

membantu account officer dalam menganalisa dan memberikan keputusan bersama.

- d. Fungsi Teller, fungsi ini juga sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan sesuai. Kwitansi 1 untuk teller sebagai berkas untuk perusahaan kwitansi 2 untuk nasabah setelah itu teller mempersiapkan uang sejumlah yang dibutuhkan pemohon dan memberikan buku tabungan dan kartu angsuran.

2. Jaringan prosedur yang membentuk system

Sistem pemberian kredit modal kerja yang ada pada PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang sudah cukup baik. Yang mana system ini tidak ribet dan mudah sehingga penggunaan system yang sudah ada ini bias dikatakan efektif dan efisien. Tetapi masih ada sedikit tambahan pada lembar ceklist pengajuan kredit modal kerja, tujuannya agar memudahkan nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit bias mengecek kekurangan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan pengajuan kredit modal kerja.

3. Prosedur pemberian kredit modal kerja

Pada prosedur pemberian kredit modal kerja dimulai dari pengajuan permohonan sampai realisasi kredit pada PT. BRI Unit Cakke Cabanf Enrekang. Oleh karena itu untuk menetapkan bahwa setiap nasabah yang akan melakukan pencairan kredit harus melalui semua tahap atau proses pemberian kredit.

- 1) Bagian customer service

Customer service memberikan kelengkapan persyaratannya. Apabila berkas pinjaman yang diterima pihak bank tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan kepada calon debitur. Setelah pengecekan dokumen oleh customer service dilakukan BI checking, kemudian semua diserahkan kepada Ka. Unit. Sistem prosedur pada saat permohonan kredit sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi sebaiknya diberikan formulir tambahan yang berupa lembar checklist untuk mempermudah nasabah dalam melengkapi berkas-berkas pengajuan kredit tersebut. Formulir lembar checklist dapat dijelaskan pada gambar berikut:

<p>Lembar <i>Checklist</i> Berkas Pengajuan Kredit Modal Kerja</p> <p>PT. Bri Unit Cakke Cabang Enrekang</p> <p>Nama Permohonan Kredit :</p> <p>Tanggal Pengajuan :</p> <p>Berkas-berkas yang diajukan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP)2. Fotocopy Kartu Keluarga3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk4. Fotocopy Akta Nikah5. Fotocopy Ijin Usaha (SHUP, TDP, NPWP)6. Fotocopy Agunan7. Foto 4x6 1 lembar

Gambar 5.1

LEMBAR CEKLIST

2) Account officer

Account officer menerima dan memeriksa kembali perlengkapan persyaratan pengajuan kredit, kemudian melakukan peninjauan ditempat usaha debitur (on the spot) dan menilai agunan nasabah. Setelah dilakukannya on the spot, maka account officer akan membuat laporan pada Lembar Kunjungan Nasabah (LKN) sesuai dengan keadaan nasabah yang sebenarnya. Setelah melakukan peninjauan lokasi usaha. Account officer melakukan evaluasi dan analisa yang berdasarkan pada prinsip 5C. Sistem prosedur dan analisis kredit sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi sebaiknya pada penilaian agunan dilakukan oleh Ka. Unit.

3) Ka. Unit

Ka. Unit membuat formulir yang berupa putusan kredit (PTK) untuk putusan kredit yang diterima. Sesuai dengan putusan Ka. Unit apabila kredit yang diajukan ditolak maka customer service akan membuat surat penolakan kredit dengan disertai alasan penolakan. Sistem prosedur pada putusan kredit sudah berjalan dengan baik.

a) Penarikan kredit

Customer service melakukan aplikasi untuk data persetujuan (menginput data) nasabah yang disetujui pinjaman kreditnya, kemudian menerbitkan surat pengakuan hutang (SPH), Surat Keterangan Menjual Agunan (SKMA), kwitansi pencairan dan tanda terima bukti agunan. Customer service menghubungi nasabah untuk

melakukan pengesahan, nasabah membawa buku tabungan dan diarahkan menuju teller untuk melakukan pencairan dana. Sistem prosedur pada saat penarikan kredit sudah berjalan cukup baik, sebainya setelah proses pengesahan selesai, customer service mengarahkan nasabah menemui Ka. Unit untuk melakukan pembinaan.

b) Pengawasan (Monitoring) Kredit

Melakukan monitoring rekening nasabah yang bersangkutan dan memantau perkembangan debitur dalam pembayaran angsuran kredit dan bunganya tiap bulannya. Pihak bank mengingatkan apabila pada saat jatuh tempo uang yang berada pada rekening nasabah secara otomatis akan terpotong guna untuk membayar tagihan angsuran. Sistem prosedur pada saat pengawasan (monitoring) kredit sudah berjalan dengan baik. Sebaiknya dalam monitoring tugas ini bias diberikan account officer saja.

4. Teller

Setelah calon peminjam disetujui pinjamannya lalu Ka. Unit melakukan proses pengesahan telah selesai lalu teller membuat kwitansi pencairan, nasabah menerima buku tabungan dan melakukan pencairan dana.

4. Dokumen dan formulir yang digunakan

Dokumen dan formulir yang digunakan dalam pemberian kredit modal kerja sudah sesuai dan mendukung pada PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang, tetapi masih ada sedikit yaitu dengan menambahkan formulir lembar checklist pengajuan kredit yang memudahkan calon pinjaman dan customer service dan pengecekan syarat-syarat pengajuan kredit modal kerja.

B. Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit Modal Kerja

1. Pada Saat Proses Permohonan Kredit

1) Personel kompeten dan dapat dipercaya

Personel yang menangani proses permohonan kredit mengetahui syarat-syarat serta data yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu mengetahui jenis kebutuhan pembiayaan yang diperlukan nasabah, mengetahui syarat-syarat kredit dan data yang dipenuhi nasabah berkaitan dengan pembiayaan tersebut dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan kredit oleh customer service harus dilakukan secara teliti agar menghindari adanya penyimpangan yang dilakukan nasabah seperti melakukan pemalsuan identitas diri. Dalam hal ini pengendalian intern pada PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang yang ditinjau dari segi personelnnya telah mendukung pengendalian intern yang baik.

2) Pemisahan tugas yang memadai

Adanya pemisahan tugas antara petugas yang menerima dan mencatat Surat Permohonan Kredit dari nasabah, yang dalam hal ini dilakukan oleh customer service. Pada saat permohonan kredit dilakukan, masih belum terdapat tugas dari pegawai yang melakukan analisis dan pemeriksaan agunan. Kedua tugas tersebut pada PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang yang melakukan adalah Account officer. Adanya tugas yang merangkap jadi satu yang dilakukan oleh account officer menjadi kelemahan dalam pengendalian intern dalam hal ini adalah kemungkinan terjadinya ketidaktepatan dalam menilai agunan, karena harga agunan merupakan asset yang penting bagi bank dari proses pelunasan kredit. Sebaiknya tugas dari account officer hanya menganalisis kredit, sedangkan penilaian agunan dilakukan oleh Ka. Unit adalah memberikan keputusan, sehingga sangat memungkinkan dalam pemeriksaan agunan dapat terlaksana dengan baik. Pengendalian intern kredit belum terlaksana dengan baik pada PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang karena belum adanya pemisahan tugas yang jelas sebagaimana mestinya.

3) Prosedur otorisasi yang tepat

Prosedur otorisasi merupakan aspek penting dalam prosedur permohonan kredit. Dalam hal ini adalah telah dipenuhi persyaratan pelaksana prosedur sesuai yang telah ditetapkan,

misalnya bagian customer service yang bertugas memeriksa permohonan dan kelengkapan data nasabah, sedangkan account officer melakukan on the spot dan menganalisis kredit nasabah. Kegiatan ini dilakukan agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan terhadap wewenang dan tugas yang telah diberikan oleh BRI. Proses permohonan kredit telah mendukung pengendalian intern yang baik karena terdapat prosedur otorisasi yang tepat pada saat permohonan kredit.

4) Dokumen dan catatan yang memadai

Setiap permohonan kredit baru, perpanjangan jangka waktu, perubahan jumlah, perubahan struktur, tipe dan syarat kredit harus berdasarkan adanya permohonan kredit secara tertulis dari calon debitur dengan mengisi formulir permohonan kredit sesuai dengan standar yang berlaku dan ditandatangani oleh pemohon disertai dengan dokumen-dokumen untuk kelengkapan permohonan kredit. Pejabat pemrakarsa account officer, telah mengecek dan meneliti kelengkapan dari persyaratan dan data-data yang dibutuhkan untuk dianalisa. Serta dokumen dan catatan administrasi cukup untuk pelaksanaan pengelolaan permohonan kredit nasabah untuk proses selanjutnya. Pengendalian intern pada saat permohonan kredit ditinjau dari dokumen dan catatan berjalan dengan baik.

5) Kontrol fisik aktiva dan catatan

Kontrol fisik aktiva dan catatan pada tahapan permohonan kredit hanya sebatas pada pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat permohonan kredit pada PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang telah efektif dilakukan, yang ditunjukkan dengan dilakukannya on the spot, kebenaran data dan informasi yang disampaikan nasabah pada permohonan kredit yang dilaksanakan oleh account officer. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengendalian intern atas control fisik aktiva dan catatan pada saat permohonan kredit sudah mendukung dengan baik.

2. Pada Saat Analisis Kredit

1) Personel kompeten dan dapat dipercaya

Pada PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang bagian menganalisa kredeit adalah account officer yang memiliki kompetensi yaitu telah memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai tentang menganalisa kredit dengan baik serta mempunyai kesadaran bahwa dalam menganalisa kredit tidak boleh terpengaruh oleh permintaan-permintaan dari pihak manapun yang dapat berpengaruh dalam penilaian. Selain itu account officer juga mempunyai sikap mental objektif, jujur, cermat dan saksama. Hal tersebut menandakan bahwa pengendalian intern kredit yang ditinjau dari segi personelnnya PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang telah mendukung pengendalian intern dengan baik.

2) Pemisahan tugas yang memadai

Pada PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang rekomendasi kredit dibuat atas dasar analisis yang dilakukan oleh account officer. Hasil rekomendasi tersebut kemudian diserahkan Ka. Unit. Ka. Unit kemudian memeriksa kembali rekomendasi yang telah dibuat oleh account officer baik dari segi keakuratan, kebenaran dan kelengkapan atas data-data dan informasi penting tentang kondisi nasabah sebelum member keputusan kredit nasabah. Pengendalian intern pada proses ini telah berjalan dengan baik adanya pemisahan tugas.

3) Prosedur otorisasi yang tepat

Prosedur otorisasi dalam proses analisis kredit yang menyangkut penerapan prinsip kehati-hatian adalah penting, pada PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang proses otorisasi telah dilakukan oleh yang berwenang berdasarkan tingkatannya, seperti account officer yang melakukan analisis kredit nasabah diperiksa kembali oleh Ka. Unit, sehingga batasan dari wewenang satuan kerja perkreditan telah jelas dan tegas. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

4) Dokumen dan catatan yang memadai

Data yang dijadikan dasar untuk informasi, analisis, evaluasi dan keputusan kredit BRI harus terjamin ketepatan, kebenaran dan

kelengkapannya oleh Pejabat kredit BRI sehingga hasil penilaian tersebut bias menjadi bahan pertimbangan yang tepat dalam memutuskan kredit.

Pada proses yang terdiri dari dokumen dan catatan administrasi, laporan kunjungan nasabah, hasil wawancara dan data informasi yang dilakukan oleh account officer sudah terjamin kebenarannya, keakuratan dan kelengkapannya. Selain itu, PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang menyediakan fasilitas atau sarana yang diperlukan untuk menyimpan dokumen-dokumen perkreditan secara aman dan tertib. Hal ini menunjukkan adanya pengendalian intern yang ditinjau dari segi dokumen dan catatan telah berjalan dengan baik.

5) Kontrol fisik aktiva dan catatan

Account officer selaku pejabat pemrakarsa pada PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang telah melakukan penilaian atas kelayakan kredit berdasarkan on the spot, mencari data dan informasi antara lain melakukan wawancara dengan nasabah dan tujuan penggunaan kredit. Sehingga pengendalian yang dilakukan berjalan dengan baik.

3. Pada Saat Penarikan Kredit

1) Personel kompeten dan dapat dipercaya

Penarikan kredit yang dilakukan oleh customer service pada PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang telah mempunyai kemampuan

selektif dan memilih calon pemohon. Pengendalian intern yang dilakukan PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang telah berjalan dengan baik.

2) Pemisahan tugas yang memadai

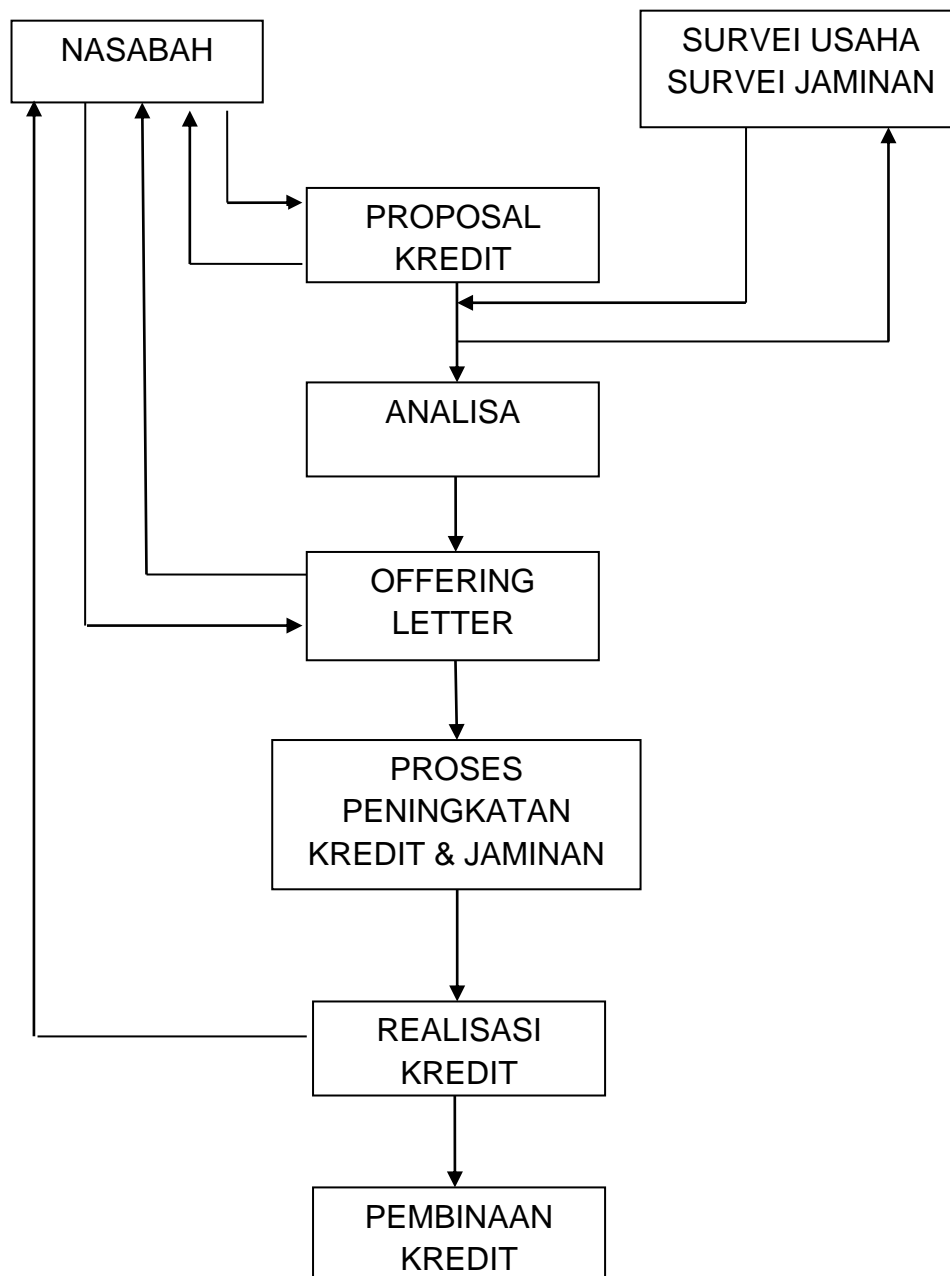
Petugas bank yang melaksanakan prose penarikan kredit adalah bagian administrasi kredit (customer service) yaitu berupa formulir yang digunakan pada saat penarikan kredit. Apabila kredit yang telah disetujui oleh Ka. Unit, maka customer service menyerahkan formulir kepada Ka. Unit untuk ditandatangani. Kemudian customer service berkoordinasi pada saat realisasi kredit. Keterangan tersebut sudah menjelaskan bahwa pejabat bank yang melakukan persetujuan atas penarikan kredit berbeda dengan petugas yang melaksanakan kredit. Pada PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang pengendalian intern saat penarikan kredit sudah berjalan dengan baik dengan adanya pemisahan tugas.

3) Prosedur otorisasi yang tepat

Pada PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang pihak yang berwenang dalam penarikan kredit adalah Ka. Unit (signer) dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh customer service (maker) yang berkoordinasi dengan teller dalam realisasi kredit. Sehingga pada saat penarikan kredit harus melalui customer service, Ka. Unit dan teller yang telah berkoordinasi. Hal ini menunjukkan

bahwa pengendalian intern pada saat prosedur otorisasi berjalan dengan baik.

C. Flow Chart Pembrian Kredit



Gambar 5.2

FLOW CHART PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA

Sumber : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cakke
Cabang Enrekang

D. Evaluasi Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit

Modal Kerja Pada PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang

Setelah penulis melakukan wawancara kepada pimpinan Unit, melakukan observasi dan mempelajari dokumen yang ada maka untuk mengetahui efektif atau tidaknya sistem pengendalian intern pemberian kredit modal kerja tersebut dilakukan dengan cara mengevaluasi unsur-unsur dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemberian kredit yang telah ditentukan oleh perusahaan kemudian membandingkan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemberian kredit yang baik. Sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang belum sepenuhnya memadai. Sudah ada struktur organisasi dan pembagian wewenang akan tetapi masih terdapat perangkapan tugas di bagian-bagian tertentu. Untuk lebih memperjelas pembahasan, evaluasi dilakukan untuk tiap elemen pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian ini merupakan tindakan kebijakan dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen tentang pengendalian dan pentingnya organisasi. Hasil wawancara mengenai evaluasi sistem pengendalian intern pada proses pemberian kredit modal kerja yang mencakup komponen yang berhubungan dengan lingkungan pengendalian meliputi:

a. Nilai integritas dan etika

Nilai integritas dan etika merupakan produk dari standar perilaku dan etika suatu entitas serta bagaimana hal tersebut dikomunikasikan dan ditetapkan dalam praktek. Semua personel harus menjunjung tinggi nilai integritas dan etika yang berlaku dalam lingkungan perusahaan. PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang sesuai dengan wawancara kepada pimpinan unit telah menerapkan peraturan yang harus dipenuhi oleh karyawan perusahaan dan untuk mendorong praktek yang sehat manajemen berusaha menghilangkan hal-hal yang bisa mendorong masing-masing personel berlaku menyimpang dari aturan dan kebijakan organisasi, maka perusahaan perusahaan akan memberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan yang telah diterapkan oleh perusahaan tersebut, dengan adanya peraturan tersebut maka perusahaan dapat mendorong karyawan untuk tidak melakukan tindakan yang tidak jujur, ilegal dan tidak memenuhi syarat yang merugikan perusahaan,

b. Komitmen terhadap kompetensi

Personel disetiap tingkat organisasi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi. PT BRI Unit Cakke Cabang

Enrekang sesuai dengan hasil wawancara karyawan telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.

c. Dewan komisaris dan komite audit

Dewan komisaris wakil dari pemegang saham, sedangkan komite audit dibentuk untuk mengawasi proses laporan keuangan. PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang memiliki dewan komisaris dan komite audit. Komite audit ditunjuk oleh dewan komisaris. Komite audit juga mempunyai kekuatan yang independen sehingga dipercaya oleh masyarakat memiliki kewajaran pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh manajemen.

d. Filosofi dan gaya operasi

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi mengarahkan tindakan dan sikap manajemen dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Sedangkan gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan. Sesuai hasil wawancara PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang telah memiliki filosofi dan gaya operasi.

e. Struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjang seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi berikut tugas, wewenang dan tanggungjawab dengan jelas. PT BRI Unit Cakke

Cabang Enrekang telah memiliki struktur organisasi yang berbentuk fungsional dimana masing-masing bagian memiliki satu fungsi dari berbagai fungsi organisasi lainnya.

f. Pembagian wewenang dan tanggung jawab

Perluasan dan pengembangan struktur organisasi terlihat dari penetapan wewenang dan tanggung jawab. Dalam suatu organisasi harus ada sistem yang mengatur pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mengotorisasi suatu transaksi. Dalam hal transaksi harus melibatkan lebih dari satu unit organisasi agar terdapat kontrol internal dari masing-masing bagian. Dalam pelaksanaannya PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang telah memiliki batasan yang jelas mengenai tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari masing-masing bagian dari manajemen puncak sampai manajemen yang ada dibawahnya. Pembagian wewenang dan tanggung jawab organisasi PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang sudah baik dan jelas, namun masih terdapat perangkapan fungsi yaitu bagian kredit.

g. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia

Aspek penting dalam sistem pengendalian intern adalah personel organisasi. Pelaksanaan pengendalian intern sangat tergantung pada personelnnya. Oleh karena itu setiap personel dalam organisasi dituntut memiliki integritas yang tinggi, nilai etika dan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan. Hasil wawancara pada PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang telah memiliki kebijakan dan praktek sumber

daya yang cukup baik. PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang telah memiliki metode yang cukup baik dalam menerima karyawan, serta pemberian kompensasi atas prestasi karyawan dalam hal mengembangkan sumber daya, PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang selalu mengadakan pelatihan-pelatihan sendiri maupun pelatihan-pelatihan yang diadakannya pihak luar yang sesuai dengan bidang tugas-tugasnya. Hasil penelitian ini telah dikuatkan oleh hasil penelitian sebelumnya Amanina (2011) yang berkesimpulan bahwa PT Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang telah memenuhi unsur lingkungan pengendalian internal dengan adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

2. Penaksiran risiko

Penaksiran risiko untuk tujuan laporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penaksiran risiko manajemen merupakan penaksiran risiko tertentu dalam laporan keuangan dan disesain serta implementasi aktivitas pengendalian yang ditunjukkan untuk mengurangi risiko tersebut pada tingkat minimum dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat. Dari hasil wawancara penaksiran risiko pada PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang sudah baik dan memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai penaksiran risiko yang baik menurut ketentuan yang sudah ditetapkan. Hasil penelitian ini telah dikuatkan oleh hasil

penelitian sebelumnya Hasil penelitian ini telah dikuatkan oleh penelitian sebelumnya Amanina (2011) yang berkesimpulan bahwa PT Bank Mandiri Cabang Majapahit Semarang telah memenuhi unsur lingkungan pengendalian internal dengan adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas, unsure penafsiran risikodimudahkan dengan adanya *Loan Origination System* (LOS) dan *Micro Banking Scoring System* (MBSS) yang dapat mengelola data dengan baik sehingga kualitas kredit yang diterima dapat dipertanggungjawabkan serta untuk informasi dan komunikasi berjalan dengan baik.

3. Informasi dan Komunikasi

Sistem akuntansi diciotakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas serta untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang tersebut. Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlihat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain. Berdasarkan hasil wawancara mengenai evaluasi pengendalian intern pada proses pemberian kredit modal kerja pada PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang sudah baik dan memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai informasi dan komunikasi yang baik menurut ketentuan yang telah ditetapkan, karena system pengendalian intern yang diterapkan sudah mampu memberikan

keyakinan yang memadai dengan adanya transaksi yang dicatat atau terjadi adalah sah, telah diotorisasi, dicatat, dinilai secara wajar, telah dicatat dalam periode yang seharusnya, telah dimasukkan kedalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar. Informasi disampaikan kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas yang terkait dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun diluar organisasi, dan informasi tersebut mencakup pedoman kebijakan, pedoman akuntansi, dan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini telah dikuatkan oleh hasil penelitian sebelumnya Faradila A. Salim (2015) yang berkesimpulan bahwa penelitian ini menunjukkan penerapan system informasi akuntansi dalam mendukung pengendalian internal pemberian kredit pada PT. Bank Bukopin Cabang Manado sudah dijalankan dengan baik.

4. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk-petunjuk dari manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian tersebut meliputi:

a. Pengendalian pengolahan informasi

Berdasarkan hasil wawancara mengenai aktivitas pengendalian pengolahan informasi, pengendalian umum, PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang telah melaksanakan aktivitas pengendalian umum dengan baik.

Mengenai aktivitas pengendalian aplikasi, PT BRI unit Cakke Cabang Enrekang telah melaksanakan aktivitas pengendalian aplikasi yaitu setiap transaksi permohonan kredit harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, setiap transaksi pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang, pencatatan transaksi permohonan kredit mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang, transaksi permohonan kredit dicatat pada saat terjadi atau segera setelah transaksi terjadi, dokumen persetujuan kredit dirancang bernomor urut tercetak, dokumen dan catatan dirancang cukup sederhana untuk menjamin kemudahan dalam pemahaman terhadap dokumen dan catatan tersebut serta mendorong pengisian dengan benar, akan tetapi belum ada karyawan yang independen yang bertugas untuk mengontrol piutang yang terjadi atas transaksi pemberian kredit.

b. Pemisahan tugas yang memadai

Pemisahan fungsi bertujuan agar masing-masing karyawan tidak melakukan tugas yang tidak sesuai dengan tugasnya. Pemisahan fungsi harus dibuat dan dirancang dengan jelas mengenai uraian tugas, wewenang, dan tanggungjawab dengan tujuan untuk mencegah dan mendeteksi adanya kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas. Pelaksanaan transaksi terjadi harus dibagi dalam berbagai fungsi sehingga masing-masing fungsi dapat saling mengawasi. Berdasarkan hasil wawancara PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang telah melaksanakan aktivitas pengendalian untuk

pemisahan fungsi antara fungsi yang memadai yaitu telah dilakukan pemisahan fungsi yang memadai yang telah dilakukan pemisahan fungsi antara fungsi penyimpanan kas dan fungsi akuntansi, fungsi pemberian kredit dengan fungsi penyimpanan kas, fungsi pemberian kredit dan fungsi akuntansi, belum ada pemisahan fungsi antara fungsi pemberian kredit dan fungsi otorisasi kredit.

c. Pengendalian fisik

Pengendalian fisik meliputi penyimpanan dokumen-dokumen, catatan-catatan serta barang jaminan kedalam almari besi atau ruang yang aman. Untuk penyimpanan dokumen-dokumen penting tersebut dibutuhkan almari besi yang tahan terhadap api untuk melindungi dokumen-dokumen penting perusahaan. PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang sudah memiliki almari besi yang tahan terhadap api untuk menyimpan dokumen perjanjian kredit, serta sudah disediakan tempat untuk menyimpan barang jaminan. Perusahaan juga telah memiliki alat mekanis berupa register kas.

d. Review kinerja

Review kerja ditunjukkan untuk melinai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan suatu pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara pada PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang telah melaksanakan aktivitas pengendalian untuk review kinerja, yaitu manajemen telah melakukan review atas kinerja terhadap laporan-laporan yang meringkas hasil noperasional perusahaan, dan manajemen yang telah melakukan

review atas kinerja yang sesungguhnya dibandingkan dengan jumlah anggaran atau hasil-hasil tahun sebelumnya. Hasil penelitian ini telah dikuatkan oleh penelitian sebelumnya Beni Makaria (2015) yang menyimpulkan bahwa system pemberian dan penerimaan kas di PT. Kasin masih mempunyai beberapa kelemahan karena terdapat beberapa dokumen yang dalam penggunaannya kurang efektif dan kesulitan dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran ke dokumen-dokumen. Pada bagian penjualan yang melakukan pemberian kredit. Sehingga, sangat memungkinkan terjadinya manipulasi pencatatan transaksi yang dapat merugikan perusahaan. Tidak adanya pemeriksa intern (pengecekan saldo) secara mendadak yang dilakukan oleh direktur utama.

5. Pemantauan

Pemantauan merupakan proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern. Aktivitas pemantauan ini dilakukan secara terus menerus dalam periode tertentu. Pemantauan harus dilakukan secara teratur dan menyeluruh untuk tiap-tiap bagian yang ada sehingga apabila ada kelemahan dalam system pengendalian intern dapat segera diperbaiki tanpa mengganggu adanya kesalahan atau kekeliruan. Berdasarkan hasil wawancara pada PT BRI Unit Cakke Cabang Enrekang sudah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai pemantauan yang baik menurut ketentuan yang ada. Hasil penelitian ini telah dikuatkan oleh hasil penelitian sebelumnya Miradewi (2014) berkesimpulan bahwa PT Bank

Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt efektif dan diharapkan lebih memaksimalkan bagi penerapan system pengendalian intern dengan cara melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sesering mungkin, sehingga jika terjadi masalah dapat diketahui sejak dini.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilaksanakan pada PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi-fungsi yang terkait saat pelaksanaan yang dilakukan oleh karyawan masing-masing bagian sudah mempunyai uraian tugas dan wewenang yang jelas sesuai dengan jabatannya. Akan tetapi dalam aktivitasnya pada fungsi *account officer* masih terdapat tugas pertangkap pada analisis kredit dan penilaian agunan. Hal ini bias menyebabkan terjadinya kesalahan dalam melakukan penilaian.
2. Sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang sudah berjalan dengan baik, mulai dari tahap pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas jaminan, wawancara, *on the spot*, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, realisasi kredit, sampai tahap penyaluran atau penarikan kredit.
3. Formulir yang digunakan tidak ada pergantian, namun disarankan adanya penambahan formulir lembar *checklist*.
4. Pengendalian intern kredit PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang telah berjalan dengan baik, tetapi terdapat pengendalian yang

kurang dalam dokumen dan catatan yang memadai pada saat pengawasan kredit yaitu kurangnya dilakukan *review* file-file kredit yang biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan, maka penulis memberikan saran pada PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya dilakukan pemisahan fungsi pada *account officer* dari fungsi analisis kredit dan fungsi penilaian agunan, sehingga penilaian agunan yang dilakukan bias lebih valid. Pemisahan fungsi ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahan yang berdampak merugikan bagi bank. *Account officer* juga harus memperhatikan analisis terhadap prospek usaha nasabah untuk melunasi kredit yang dipinjamnya.
2. Formulir lembar checklist untuk pengajuan permohonan kredit perlu ditambahkan, karena dengan adanya formulir lembar checklist ini memudahkan bagi calon peminjam dan *customer service* dalam mengetahui kekurangan dan mencecklistkan syarat-syarat pengajuan kredit.
3. PT. BRI Unit Cakke Cabang Enrekang sebaiknya juga bisa menambahkan nomor urut antrian. Nomor urut ini berguna untuk melayani nasabah calon peminjam kredit, supaya bagian *customer*

service lebih mudah memanggil calon peminjam sesuai dengan nomor urut antrian yang tersedia.

4. Sebaiknya dalam pengendalian intern dilakukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Keuangan (BPK), dan Auditor Independen pengawasan dokumen atau file-file secara rutin setiap 1 tahun sekali. Karena dengan adanya pengawasan ini bias menjaga profesionalitas kinerja sehingga bias meningkatkan efektifitas pengendalian intern pada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. *Manajemen Pemasaran. Cetakan II.*

Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.

Firdaus, Rachmat, Maya Aryanti (2011). *Manajemen Perkreditan Bank*

Umum. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Hery 2013. *Setiap auditor harus baca buku ini.* Jakarta: Penerbit Grasindo.

Kasmir 2014. *Dasar-dasar Perbankan.* Edisi Revisi. Cetakan kedua belas.

Jakarta.: penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Kamsir 2012. *Analisis Laporan Keuangan.* Jakarta: Penerbit PT. Raja

Grafindo Persada.

Kasmir.2011. *Analisis Laporan Keuangan.* Jakarta: Penerbit Raja

Grafindo Persada.

Mulyadi. *Audit 1.* Edisi Keenam. Jakarta: Penerbit Salemba.

Mulyadi. *Audit 2.* Edisi Keenam. Jakarta: Penerbit Salemba.

Martono, Nanang (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif.* Analisis Isi dan

Analisis Sekunder, Ed.Revisi 2. Jakarta: Rajawali Pers.

Mulyadi , 2013. *Sistem Akuntansi.* Edisi ketiga, Cetakan ketiga. Jakarta:

Penerbit Salemba Empat.

Valery G. Kumaat 2011. *Internal Audit.* Jakarta: Penerbit Erlangga

RIWAYAT HIDUP



FAJRA YANA T, Lahir di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, 22 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 12 September 1996. Anak ke-1 dari 5 bersaudara, yang merupakan buah hati dari pasangan Tajuddin dan Musniati.

Penulis memulai jenjang pendidikan sekolah dasar pada tahun 2002 di SDN 119 Belalang hingga tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Anggeraja, dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Anggeraja dan tamat tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan Alhamdulillah telah mendapat gelar SE pada tanggal 6 Oktober 2018.

